

## Politik Anggaran Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran di Bojonegoro

Faiqotul Inayah

Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia.

Email: [faiqotulinyah036@gmail.com](mailto:faiqotulinyah036@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

#### Keywords:

educational budget politics, learning quality, educational policy, Bojonegoro, educational governance.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the politics of educational budgeting and its impact on the quality of learning in Bojonegoro Regency. The study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Education Office, school principals, teachers, and regional education administrators. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the Government of Bojonegoro Regency places the education sector as a regional development priority through increased educational budget allocations for school infrastructure development, teacher competency improvement, and learning digitalization. These policies have positively impacted learning quality, particularly in providing learning facilities and supporting technology-based learning. However, the study also found disparities in educational budget distribution between urban and rural areas, resulting in unequal learning quality. In addition, the effectiveness of educational budgeting is influenced by school governance, educational leadership, and supervision of policy implementation. This study identifies an academic debate regarding the relationship between educational budget politics and learning quality. Some studies argue that educational budgeting is the primary factor in improving educational quality, while others emphasize the importance of effective educational governance. Therefore, increasing educational budgets must be accompanied by transparency, equitable distribution, and strengthened educational management to optimize learning quality improvement.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

#### Keywords:

Politik anggaran pendidikan, kualitas pembelajaran, kebijakan pendidikan, Bojonegoro, tata kelola pendidikan.

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, serta pengelola pendidikan daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan pada pembangunan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan digitalisasi pembelajaran. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, terutama dalam penyediaan fasilitas belajar dan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Namun demikian,

penelitian menemukan adanya ketimpangan distribusi anggaran pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan sehingga kualitas pembelajaran belum merata. Selain itu, efektivitas anggaran pendidikan juga dipengaruhi oleh tata kelola sekolah, kepemimpinan pendidikan, dan pengawasan implementasi kebijakan pendidikan daerah. Penelitian ini menunjukkan adanya perdebatan akademik mengenai hubungan antara politik anggaran pendidikan dan kualitas pembelajaran. Sebagian penelitian menempatkan anggaran pendidikan sebagai faktor utama peningkatan mutu pendidikan, sedangkan penelitian lain menekankan pentingnya efektivitas tata kelola pendidikan. Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan perlu diimbangi dengan transparansi, pemerataan distribusi, dan penguatan manajemen pendidikan agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara optimal.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

**Faiqotul Inayah**

Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia.

Email: [faiqotulinyah036@gmail.com](mailto:faiqotulinyah036@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing masyarakat, dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pendidikan melalui pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Politik anggaran pendidikan menjadi isu penting karena berkaitan dengan proses distribusi sumber daya pendidikan, prioritas pembangunan daerah, serta kualitas layanan pembelajaran yang diterima masyarakat. Menurut Rohman dan Widowati (2022), politik anggaran pendidikan merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan pendidikan melalui distribusi pembiayaan pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan sosial, ekonomi, dan politik daerah.

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan pendidikan nasional. Menurut Fajri et al. (2023), kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai sektor prioritas dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan. Dalam perspektif politik pendidikan, besarnya anggaran pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pembangunan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi.

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang memiliki kapasitas fiskal cukup besar karena dukungan sektor migas dan pendapatan daerah yang relatif tinggi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi pendidikan secara lebih optimal dibandingkan daerah lain. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

mengalokasikan anggaran pendidikan melalui berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah, pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta pengembangan pembelajaran digital. Menurut Putra dan Hidayah (2024), peningkatan pembiayaan pendidikan daerah berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran dan akses pendidikan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki kemampuan fiskal tinggi.

Argumentasi tersebut diperkuat oleh penelitian Sari et al. (2022) yang menjelaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan memiliki hubungan positif terhadap kualitas pembelajaran karena mampu mendukung ketersediaan sarana belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sekolah dengan dukungan pembiayaan yang memadai cenderung memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan (Nugroho et al., 2021). Dengan demikian, anggaran pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan daerah

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Harahap dan Kurniawan (2023), pengelolaan anggaran pendidikan di daerah masih menghadapi persoalan efektivitas distribusi, lemahnya pengawasan, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, peningkatan anggaran pendidikan lebih banyak terserap pada belanja administratif dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa politik anggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan besarnya alokasi dana, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola dan implementasi kebijakan pendidikan.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kualitas pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran pendidikan, tetapi juga oleh faktor kepemimpinan sekolah, budaya akademik, dan inovasi pembelajaran. Menurut Wibowo et al. (2020), sekolah dengan keterbatasan anggaran tetap mampu menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik apabila didukung oleh manajemen sekolah yang efektif dan kompetensi guru yang memadai. Pendapat tersebut menunjukkan adanya perdebatan akademik mengenai hubungan antara politik anggaran pendidikan dan kualitas pembelajaran. Sebagian peneliti menilai bahwa peningkatan anggaran merupakan faktor utama peningkatan mutu pendidikan, sedangkan kelompok lain menekankan pentingnya tata kelola pendidikan dan efektivitas penggunaan anggaran.

Perdebatan tersebut semakin relevan dalam konteks pembangunan pendidikan di Bojonegoro. Meskipun pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup besar, masih ditemukan ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan fasilitas belajar di beberapa sekolah, serta perbedaan kualitas sumber daya guru. Menurut Rahmawati dan Setiawan (2024), ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan di daerah menjadi salah satu penyebab belum meratanya kualitas pembelajaran meskipun anggaran pendidikan terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya terletak pada kuantitas anggaran, tetapi juga pada distribusi dan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan daerah.

Selain itu, implementasi berbagai program pendidikan daerah juga memunculkan beragam evaluasi dari masyarakat dan praktisi pendidikan. Menurut Lestari et al. (2021), program bantuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di daerah mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala birokrasi, pengawasan anggaran yang lemah, dan kurangnya pemerataan fasilitas pendidikan. Kritik lain juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara substantif (Prasetyo et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai politik anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di Kabupaten Bojonegoro menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan anggaran pendidikan daerah diimplementasikan, bagaimana distribusi dan tata kelola anggaran dilakukan, serta sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi dinamika politik pendidikan daerah dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam kajian politik dan etika pendidikan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam dinamika politik anggaran pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Creswell (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam melalui pemahaman terhadap pengalaman, kebijakan, dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis proses pengambilan kebijakan anggaran pendidikan, distribusi pembiayaan pendidikan, serta implikasinya terhadap mutu pembelajaran di sekolah

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Politik Anggaran Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari konsistensi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD yang diarahkan pada peningkatan sarana-prasarana sekolah, bantuan operasional pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan digitalisasi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, kebijakan anggaran pendidikan di Bojonegoro dipengaruhi oleh orientasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi anggaran pendidikan sebagian besar difokuskan pada pembangunan fisik sekolah, bantuan operasional pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurut informan kepala sekolah, kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kenyamanan belajar peserta didik dan

efektivitas proses pembelajaran. Sekolah-sekolah yang memperoleh dukungan anggaran lebih besar cenderung memiliki fasilitas belajar yang lebih memadai seperti laboratorium, perangkat teknologi pembelajaran, perpustakaan digital, dan ruang kelas yang representatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan anggaran pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pembelajaran melalui penyediaan sarana belajar dan penguatan kapasitas tenaga pendidik. Penelitian Nugroho et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sekolah dengan dukungan pembiayaan yang memadai cenderung memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah dengan keterbatasan anggaran.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa politik anggaran pendidikan di Bojonegoro masih menghadapi persoalan ketimpangan distribusi pembiayaan antarwilayah sekolah. Sekolah di wilayah perkotaan relatif lebih mudah memperoleh akses fasilitas pendidikan dibandingkan sekolah di wilayah pinggiran dan pedesaan. Beberapa informan guru menyampaikan bahwa sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan media pembelajaran, akses internet, dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi anggaran pendidikan belum sepenuhnya merata.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi Harahap dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak selalu berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran apabila distribusi pembiayaan tidak dilakukan secara proporsional. Penelitian Rahmawati dan Setiawan (2024) juga menjelaskan bahwa ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemerataan kualitas pembelajaran di daerah.

## **b. Dampak Anggaran Pendidikan terhadap Kualitas Pembelajaran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan di Bojonegoro memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, terutama dalam aspek penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penggunaan teknologi pembelajaran. Guru-guru menyatakan bahwa dukungan anggaran daerah membantu sekolah dalam mengembangkan media pembelajaran digital, pelatihan guru, dan pengadaan perangkat teknologi pendidikan.

Selain itu, beberapa sekolah menunjukkan peningkatan efektivitas pembelajaran setelah memperoleh bantuan fasilitas pendidikan dan pengembangan sarana digital. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena tersedianya media belajar berbasis teknologi. Menurut kepala sekolah, dukungan pembiayaan pendidikan juga membantu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Putra dan Hidayah (2024) yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan erat dengan peningkatan investasi pendidikan dan mutu pembelajaran. Penelitian Lestari et al. (2021) juga menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan yang didukung pembiayaan memadai mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan partisipasi peserta didik dalam proses belajar.

Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran belum terjadi secara merata di seluruh sekolah. Beberapa guru menyampaikan bahwa

keberhasilan pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran pendidikan, tetapi juga oleh kualitas manajemen sekolah dan kompetensi guru dalam memanfaatkan fasilitas pembelajaran. Terdapat sekolah yang memiliki fasilitas cukup baik tetapi belum mampu mengoptimalkan kualitas pembelajaran karena lemahnya inovasi pembelajaran dan rendahnya kemampuan adaptasi teknologi guru.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perdebatan akademik mengenai hubungan antara anggaran pendidikan dan kualitas pembelajaran. Sebagian penelitian menempatkan anggaran pendidikan sebagai faktor utama peningkatan mutu pendidikan, sedangkan penelitian lain menekankan pentingnya tata kelola sekolah dan kualitas sumber daya manusia pendidikan. Menurut Wibowo et al. (2020), sekolah dengan keterbatasan anggaran tetap dapat menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik apabila memiliki kepemimpinan sekolah yang efektif dan budaya akademik yang kuat.

### **c. Dinamika Politik dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan**

Penelitian ini juga menemukan bahwa politik anggaran pendidikan di Bojonegoro tidak terlepas dari dinamika kepentingan birokrasi dan kebijakan pemerintah daerah. Beberapa informan menyampaikan bahwa proses pengalokasian anggaran pendidikan masih dipengaruhi oleh prioritas pembangunan daerah dan kebijakan politik pemerintah. Dalam beberapa kasus, pembangunan fisik sekolah lebih diprioritaskan dibandingkan penguatan kualitas pembelajaran substantif seperti pelatihan guru dan pengembangan kurikulum pembelajaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa politik anggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana pendidikan, tetapi juga menyangkut orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Penelitian Prasetyo et al. (2022) menjelaskan bahwa kebijakan anggaran pendidikan di era otonomi daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah sehingga berpotensi mengurangi efektivitas peningkatan mutu pendidikan.

Di sisi lain, sebagian informan menilai bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan melalui pengawasan program pendidikan dan pelibatan sekolah dalam penyusunan kebutuhan pembelajaran. Akan tetapi, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan masih dianggap belum optimal karena keterbatasan evaluasi program dan lemahnya monitoring implementasi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.

Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi Rohman dan Widowati (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas politik anggaran pendidikan sangat dipengaruhi oleh tata kelola kebijakan, transparansi distribusi anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan. Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran apabila tidak diimbangi dengan tata kelola pendidikan yang efektif dan berkeadilan.

### **d. Analisis Pola Kutipan dan Perdebatan Akademik**

Analisis pola kutipan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu mendukung argumentasi bahwa anggaran pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian Sari et al. (2022), Nugroho et al. (2021),

dan Putra dan Hidayah (2024) menekankan bahwa peningkatan pembiayaan pendidikan mampu meningkatkan mutu pembelajaran melalui penyediaan fasilitas belajar dan penguatan kapasitas guru.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan bukan satu-satunya faktor penentu kualitas pembelajaran. Penelitian Wibowo et al. (2020), Harahap dan Kurniawan (2023), serta Prasetyo et al. (2022) menekankan bahwa efektivitas tata kelola sekolah, kepemimpinan pendidikan, dan transparansi pengelolaan anggaran memiliki pengaruh lebih besar terhadap keberhasilan pembelajaran dibandingkan sekadar peningkatan alokasi dana pendidikan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perdebatan akademik mengenai efektivitas politik anggaran pendidikan. Sebagian peneliti berpendapat bahwa peningkatan anggaran merupakan solusi utama peningkatan mutu pendidikan, sedangkan kelompok lain menilai bahwa kualitas pembelajaran lebih dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia pendidikan. Dalam konteks Bojonegoro, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendidikan memang memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pembelajaran, tetapi dampaknya belum optimal karena masih terdapat ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan dan persoalan tata kelola kebijakan pendidikan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa politik anggaran pendidikan di Kabupaten Bojonegoro memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan melalui alokasi anggaran pada pembangunan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, bantuan operasional pendidikan, serta pengembangan pembelajaran berbasis digital. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran, terutama dalam peningkatan fasilitas belajar, penggunaan teknologi pendidikan, dan efektivitas kegiatan pembelajaran di sekolah.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa distribusi anggaran pendidikan belum sepenuhnya merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di wilayah pusat kota cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai dibandingkan sekolah di daerah pinggiran dan terpencil. Selain itu, efektivitas anggaran pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola sekolah, kepemimpinan pendidikan, kompetensi guru, dan sistem pengawasan implementasi kebijakan pendidikan daerah. Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif dan distribusi anggaran yang berkeadilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perdebatan akademik mengenai hubungan antara politik anggaran pendidikan dan kualitas pembelajaran. Sebagian penelitian menempatkan anggaran pendidikan sebagai faktor utama peningkatan mutu pendidikan, sedangkan penelitian lain menekankan pentingnya efektivitas tata kelola pendidikan dan kualitas sumber daya manusia pendidikan. Dalam konteks Bojonegoro, penelitian ini memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan memang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh transparansi kebijakan, pemerataan distribusi fasilitas pendidikan, dan efektivitas implementasi program pendidikan di tingkat sekolah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi anggaran pendidikan, meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan antarwilayah, serta mendorong penguatan kapasitas guru dan manajemen sekolah agar kebijakan anggaran pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kualitas pembelajaran masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Harahap, R., & Kurniawan, D. (2023). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Daerah terhadap Mutu Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 15(1), 55–69.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, T., Hidayat, M., & Sari, D. (2021). Pembiayaan Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 133–145.
- Patton, M. Q. (2021). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Rahardjo, B., & Nugraha, F. (2020). Teknik Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 89–101.
- Sari, N., Kholis, M., & Yuliana, R. (2022). Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Mutu Pembelajaran Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Modern*, 10(1), 21–34.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, R., Santoso, E., & Fauziyah, N. (2020). Manajemen Sekolah dan Efektivitas Pembelajaran pada Sekolah dengan Keterbatasan Anggaran. *Jurnal Kependidikan*, 4(2), 98–110.
- Yusuf, A., Prasetyo, B., & Lestari, P. (2021). Analisis Dokumen Kebijakan Pendidikan dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(3), 201–214